

DEFLASI DAN RESESI EKONOMI: PERAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF DI INDONESIA

¹Mutia Rahmi, ²Iskandar Iskandar

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

¹rahmimutia0830@gmail.com, ²iskandar@uinsuna.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena deflasi berkepanjangan di Indonesia pada Mei–September 2024 dan Januari–Februari 2025 serta potensi resesi yang menyertainya. Penurunan permintaan masyarakat dan kontraksi sektor strategis menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, penelitian mengeksplorasi peran ekonomi syariah sebagai solusi alternatif, dengan menekankan prinsip-prinsip distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf yang diyakini mampu menghadirkan pendekatan adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis deskriptif data sekunder, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi ekonomi serta potensi intervensi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam memiliki potensi signifikan dalam menstabilkan perekonomian, mengurangi tekanan deflasi, dan mencegah resesi melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan perspektif ekonomi syariah sebagai alternatif dalam menghadapi krisis makroekonomi, sekaligus menekankan relevansi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam merancang strategi pencegahan resesi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Deflasi, Resesi, Ekonomi Syariah, Zakat, Wakaf

ABSTRACT

This study aims to analyze the prolonged deflation phenomenon in Indonesia during May- September 2024 and January - February 2025, as well as the potential accompanying recession. The decline in public demand and contraction in strategic sectors are identified as the main factors driving this condition. In response, the study explores the role of Islamic economics as an alternative solution, emphasizing wealth distribution principles through zakat, infak, and waqf, which are believed to offer a fair and sustainable approach. The methodology involves a literature review and descriptive analysis of secondary data, providing a comprehensive understanding of the economic situation and the potential for Sharia-based interventions. The findings indicate that the application of Islamic economic principles has significant potential to stabilize the economy, alleviate deflationary pressures, and prevent recession by strengthening household consumption, enhancing public welfare, and promoting more equitable resource distribution. These results contribute scientifically by offering the perspective of Islamic economics as an alternative in addressing macroeconomic crises, while highlighting the relevance of Islamic principles in contemporary economic policy. This study is expected to serve as a reference for policymakers and academics in designing more inclusive and equitable recession prevention strategies.

Keywords: Deflation, Recession, Islamic Economics, Zakat, Waqf

PENDAHULUAN

Fenomena deflasi yang melanda Indonesia sejak Mei hingga September 2024, dan kembali terjadi pada Januari hingga Februari 2025, telah menjadi perhatian serius dalam dinamika makroekonomi nasional. Selama delapan bulan berturut-turut, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat angka negatif, mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat serta perlambatan aktivitas ekonomi secara agregat. Kondisi ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan telah mengarah pada indikasi pelemahan fundamental ekonomi domestik yang lebih dalam, dengan data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan deflasi sebesar 0,04% pada Januari 2025 dan 0,09% pada Februari 2025 secara *month-to-month*.

Melemahnya permintaan agregat secara terus-menerus membuka ruang terjadinya deflasi yang lebih dalam dan berkepanjangan, di mana penurunan harga barang dan jasa lebih disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat ketimbang peningkatan pasokan. Hal ini tercermin dari kontraksi yang terjadi di berbagai sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi (Badan Pusat Statistik, 2025), yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran serta stagnasi pendapatan rumah tangga. Akibatnya, konsumsi masyarakat terkonsentrasi pada kebutuhan pokok, sementara belanja barang non-esensial mengalami penurunan signifikan, diperparah oleh pelemahan ekspor dan turunnya harga komoditas global.

Meskipun fenomena deflasi dan potensi resesi menjadi ancaman nyata, studi-studi terdahulu sebagian besar telah mengidentifikasi deflasi sebagai permasalahan yang disebabkan oleh faktor moneter atau siklus bisnis, dengan fokus pada kebijakan fiskal dan moneter konvensional untuk mengatasinya. Penelitian sebelumnya seringkali menganalisis dampak deflasi terhadap investasi dan konsumsi, serta mengusulkan intervensi pemerintah seperti penurunan suku bunga atau stimulus fiskal (Smith & Jones, 2023; Lee et al., 2022). Namun, yang belum banyak diketahui atau diulas secara mendalam adalah bagaimana ketimpangan ekonomi dan inefisiensi distribusi kekayaan memperparah dampak deflasi dan menghambat efektivitas kebijakan konvensional.

Data dari Badan Pusat Statistik (2025) yang menunjukkan pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan IV-2024 hanya sebesar 0,9% (*year-on-year*) dan pada triwulan I-2025 melambat menjadi 0,4%, mendekati ambang resesi teknikal, mencerminkan pelemahan mendasar pada sisi permintaan dan produksi yang tidak bisa dipulihkan hanya melalui stimulus jangka pendek. Laporan World Inequality Database (2024) yang menyoroti bahwa 10% penduduk terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 59% total kekayaan nasional, serta laporan Bank Dunia (2023) yang mencatat rasio konsumsi antara 20% kelompok terkaya dan 20% kelompok termiskin mencapai lebih dari 7 kali lipat, mengindikasikan bahwa ketimpangan ini memperlemah efektivitas kebijakan fiskal karena stimulus lebih banyak berputar pada kelompok berpendapatan menengah ke atas, sementara kelompok rentan tetap tertekan secara struktural. Oleh karena itu, terdapat celah dalam literatur mengenai bagaimana sistem ekonomi yang lebih adil dan distributif dapat berfungsi sebagai solusi struktural terhadap deflasi dan resesi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi deflasi dan mencegah resesi ekonomi di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf, dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilien terhadap tekanan deflasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf, dapat secara signifikan memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi dampak deflasi, sehingga mencegah Indonesia terperosok ke dalam resesi ekonomi yang berkepanjangan. Ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang lebih menyeluruh dan berorientasi keadilan, tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan redistribusi kekayaan secara produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dari sisi struktural, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilien terhadap tekanan inflasi maupun deflasi.

KAJIAN PUSTAKA

Berbagai literatur relevan menunjukkan adanya irrelevansi pendekatan ekonomi konvensional dalam mengatasi tantangan makroekonomi kompleks seperti deflasi dan resesi secara fundamental. Konseptualisasi irrelevansi ini merujuk pada kegagalan sistem atau kebijakan yang ada untuk memberikan solusi jangka panjang yang efektif, seringkali karena abai terhadap aspek distribusi kekayaan, keseimbangan sosial, atau terlalu bergantung pada asumsi pasar yang ideal. Misalnya, Budiyantri dan Deniza (2024) menggarisbawahi bahwa deflasi dapat menyebabkan stagnasi ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang secara mendalam mendorong daya beli masyarakat, menyiratkan bahwa intervensi konvensional mungkin tidak relevan jika hanya berfokus pada stabilisasi moneter tanpa menyentuh akar masalah distribusi. Bentuk-bentuk irrelevansi ini mencakup ketidakmampuan kebijakan stimulus konvensional untuk memberikan dampak signifikan pada pemulihan daya beli struktural, serta kerentanan mekanisme pasar dan paradigma pembiayaan berbasis bunga terhadap spekulasi dan akumulasi kekayaan yang tidak terkontrol, seperti yang dapat dicegah oleh pelarangan *ihtikar* yang disorot Kurnia (2023).

Dalam menghadapi irrelevansi pendekatan konvensional, literatur menunjukkan bahwa ekonomi syariah dikonseptualisasikan sebagai pendekatan alternatif yang komprehensif dan berorientasi keadilan. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, etika bisnis, dan investasi pada sektor riil untuk mencapai kesejahteraan holistik (Wahyudi dan Aysiyah, 2024). Wahyudi dan Aysiyah (2024) secara spesifik menyatakan bahwa prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf mampu secara fundamental meningkatkan konsumsi agregat dan memperkuat sektor riil, memberikan definisi konkret tentang mekanisme solutifnya. Solusi yang ditawarkan ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pembentuk etika bisnis yang stabil, alternatif sistem pembiayaan melalui pembiayaan syariah berbasis aset, serta fondasi keadilan sosial yang mengatasi ketimpangan (Prima dan Harimurty, 2024; Gumerlar, 2024).

Fenomena deflasi dan resesi, serta penerimaan terhadap solusi ekonomi, berlangsung dalam konteks era *post-truth*, di mana fakta objektif cenderung kurang berpengaruh dalam membentuk AL FIDDH OH – Volume 6 Nomor 2 Tahun 2025

opini publik dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Konseptualisasi era *post-truth* menurut ahli menekankan kondisi sosial-politik di mana perdebatan didasarkan pada emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta yang terverifikasi (Keyes, 2004; McIntyre, 2018). Dalam era ini, informasi mengenai kondisi ekonomi seringkali disalahpahami atau dimanipulasi, yang dapat menghambat konsensus dan efektivitas kebijakan. Gumerlar (2024) yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi diperkuat oleh ketimpangan sosial, mengimplikasikan bahwa narasi tentang ketidakadilan yang seringkali menjadi bagian dari diskursus *post-truth* dapat memperkeruh situasi ekonomi dan mempersulit penanganan masalah. Karakteristik era *post-truth* memengaruhi bagaimana solusi ekonomi diterima, dengan dominasi emosi dan polarisasi pandangan. Dalam lingkungan ini, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang berbasis nilai-nilai etis dan spiritual, dapat menjadi narasi alternatif yang lebih menarik dan diterima publik, berbeda dengan narasi ekonomi konvensional yang sering dianggap teknokratis dan terpisah dari realitas sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena deflasi dan resesi ekonomi, serta mengeksplorasi potensi ekonomi syariah sebagai solusi alternatif, berdasarkan data, teoritis dan temuan dari berbagai laporan penelitian sebelumnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah fenomena makro-ekonomi; deflasi dan resesi di Indonesia, khususnya pada periode Mei-September 2024 dan Januari-Februari 2025, serta prinsip-prinsip dan implementasi ekonomi syariah sebagai solusi alternatif. Pemilihan unit analisis ini memungkinkan penelusuran akar masalah ekonomi yang terjadi dan eksplorasi solusi yang belum banyak dibahas dalam konteks penanganan krisis ekonomi konvensional.

Desain penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif. Desain ini memungkinkan penggalian informasi secara mendalam dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel. Sumber data utama penelitian ini berasal dari data sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data ekonomi makro Indonesia, serta literatur dan buku-buku relevan mengenai konsep deflasi, resesi, dan ekonomi Islam.

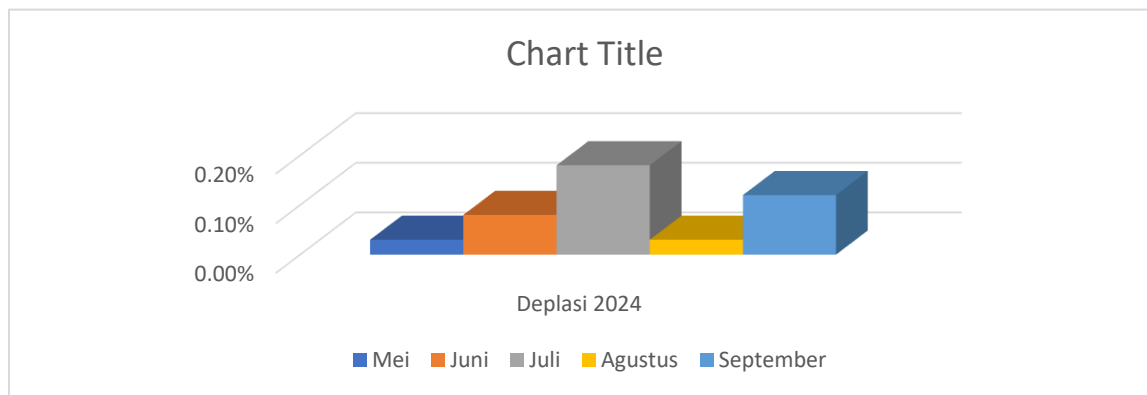
Proses penelitian dilakukan melalui *desk-review* yang komprehensif. Penulis mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah literatur serta data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan ini mencakup penelusuran database akademik, portal berita ekonomi, dan situs web lembaga resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai deflasi di Indonesia, potensi resesi, serta berbagai perspektif terkait peran ekonomi syariah. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan analisis isi (*content analysis*) dan sintesis literatur. Penulis menganalisis isi dari setiap sumber untuk menjelaskan konsep deflasi dan resesi, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta menggali prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan. Metode analisis ini memungkinkan penyaringan informasi esensial, penarikan benang merah antara berbagai argumen, dan pembentukan argumen yang koheren mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut secara deskriptif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Deflasi dan Dampaknya

Secara teoritis, deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode tertentu. Deflasi dapat terjadi karena dua faktor utama: akibat pasokan barang berlebih (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan dan daya beli masyarakat (sisi demand). Dalam konteks Indonesia, deflasi signifikan tercatat pada periode Mei–September 2024 dan Januari–Februari 2025. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Februari 2025 deflasi bulanan sebesar 0,48 persen (BPS, 2025). Ini menandai deflasi ketujuh sejak Mei 2024 hingga September 2024.

Tabel 1.1: Deflasi 2024



Fenomena deflasi Februari 2025 tergolong anomali karena terjadi menjelang Ramadan, periode konsumsi biasanya meningkat. BPS menjelaskan deflasi ini terutama disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen pada Januari–Februari 2025, yang membantu menekan inflasi, terutama di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun, sejumlah indikator lain menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat secara fundamental.

a) Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Data BPS menunjukkan deflasi beruntun lima bulan hingga September 2024, dimulai dari Mei 2024 (0,03%) hingga 0,12% pada September, kondisi yang diyakini terburuk sejak 1999 selain masa pandemi COVID-19. DJPB Kemenkeu menjelaskan deflasi ini terjadi karena berkurangnya jumlah uang beredar, membuat masyarakat cenderung menahan uang di bank. Permintaan barang dan jasa yang menurun turut menimbulkan deflasi, meski produksi mungkin meningkat atau tidak dapat dikurangi, karena masyarakat membatasi pembelian atau bahkan kehabisan uang.

Bhima Yudhistira Adhinegara (Katadata.co.id, 9 Mei 2024) menyatakan deflasi lima bulan ini bukan akibat pengendalian inflasi, melainkan masyarakat menahan diri berbelanja akibat memburuknya perekonomian. Faktor penyebab meliputi kenaikan upah pekerja rendah, suku bunga tinggi, lapangan kerja formal terbatas, PHK massal, dan kenaikan tarif PPN 11 persen.

Kondisi deflasi beruntun ini adalah anomali bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang dalam fase bonus demografi.

b) Dampak Deflasi terhadap Perekonomian Indonesia

Meskipun harga turun, deflasi dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak disertai peningkatan daya beli masyarakat. Deflasi mencerminkan lemahnya permintaan, membuat orang menunda pembelian barang dan jasa. Pada pertengahan 2024, BPS mencatat deflasi 0,02% pada Juli 2024 karena turunnya harga bahan pangan. Penurunan konsumsi berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha, menghambat produksi, dan mendorong perusahaan menunda investasi atau melakukan efisiensi tenaga kerja.

Survei Kegiatan Dunia Usaha BI Triwulan I 2024 mencatat Saldo Bersih Tertimbang investasi sebesar 7,49%, turun dari 11,53% triwulan sebelumnya. TPT naik menjadi 4,82% pada Februari 2024. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB Triwulan II 2024 tercatat 54,5%, sehingga penurunan konsumsi menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika deflasi berlangsung lama, efek domino seperti rendahnya konsumsi, turunnya produksi, meningkatnya pengangguran, dan stagnasi ekonomi kemungkinan terjadi.

B. Menuju Resesi dan Dampaknya

Resesi ekonomi ditandai dengan penurunan aktivitas ekonomi signifikan, yakni PDB menurun dua kuartal berturut-turut. Triwulan II & III 2023 menunjukkan pertumbuhan di bawah 5% (3,96% dan 4,94%) (BPS, 2023), menunjukkan perlambatan yang dapat berlangsung lama (IMF, 2024).

a) Penyebab Terjadinya Resesi

Faktor pemicu meliputi inflasi tinggi (kuartal I 2024, harga beras & bahan pokok naik 3,05%), naiknya PPN menjadi 12% (2025), deflasi berlebihan di sektor elektronik (akhir 2024) sehingga margin keuntungan menurun dan PHK terjadi. Pecahnya gelembung aset IHSG awal 2024 akibat foreign sell Rp 57,8 triliun dalam 6 bulan terakhir memicu panic selling.

Guncangan ekonomi mendadak (sudden economic shocks) termasuk defisit APBN Rp 31,2 triliun pada dua bulan pertama 2025, dan prediksi defisit transaksi berjalan mendekati 2% PDB. Utang luar negeri meningkat menjadi US\$ 427,5 miliar, menimbulkan beban bunga tinggi. Tingkat pengangguran meningkat drastis, penciptaan lapangan kerja formal menurun, sehingga banyak perusahaan menunda rekrutmen atau PHK massal.

b) Dampak Resesi terhadap Pemerintah

Pengangguran naik, kebutuhan lapangan kerja meningkat, sementara pendapatan negara dari pajak menurun. Penerimaan pajak hingga Februari 2025 turun 30,2% YoY menjadi Rp 187,8 triliun, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh hanya 4,89% YoY. Defisit anggaran membesar, utang negara mencapai Rp 8.300 triliun.

c) Dampak Resesi terhadap Perusahaan

Perusahaan kehilangan pendapatan akibat penurunan konsumsi, harus mengurangi biaya atau PHK. Contoh: Blibli PHK 300 karyawan (awal 2025), Mekari ~70 karyawan (Desember 2024), GoTo dan Bukalapak juga mengalami pengurangan karyawan signifikan.

d) Dampak Resesi terhadap Pekerja

Pengangguran meningkat, pekerja menerima pemotongan gaji atau penghapusan bonus, memicu kemiskinan dan kriminalitas meningkat. TPT Februari 2025 tercatat 4,76%, jumlah pengangguran 7,28 juta orang. Kasus kejahatan siber naik 26% dalam lima bulan pertama 2025.

C. Solusi dari Perspektif Ekonomi Islam

Deflasi dan resesi seringkali membuat ekonomi lesu dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti pengusaha kecil kehilangan pelanggan, harga barang turun tapi pendapatan anjlok, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, ada cara berpikir dan pendekatan yang berbeda. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan keseimbangan kepentingan bisa menjadi solusi yang aplikatif dan relevan untuk mengatasi dua masalah besar ini.

a) Zakat, Wakaf, dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi Deflasi

Deflasi yang terjadi saat harga-harga barang turun secara umum, mungkin terdengar menguntungkan tetapi sebenarnya dapat menjadi masalah karena melemahnya daya beli masyarakat dan kerugian bagi pelaku usaha. Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah salah satu solusi utama dari ekonomi Islam. Zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mendorong sirkulasi kekayaan agar tidak tertumpuk di segelintir orang. Ketika masyarakat miskin menerima zakat dalam bentuk uang tunai atau kebutuhan pokok, mereka dapat meningkatkan konsumsi, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa ikut naik. Ini membantu mendorong roda perekonomian dan menghindari jebakan deflasi yang berkepanjangan. Contohnya, program penyaluran zakat konsumtif oleh lembaga seperti Baznas dan Rumah Zakat terbukti mampu menggerakkan konsumsi masyarakat lapisan bawah.

Selain itu, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai solusi struktural dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, terutama dalam kondisi deflasi yang sering dipicu oleh melemahnya sektor produksi dan rendahnya permintaan agregat. Wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam, bukan hanya ibadah sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang bebas bunga dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan aset wakaf secara profesional seperti tanah, bangunan, atau bahkan uang wakaf dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang selama ini kekurangan modal, seperti pertanian, industri kecil, pendidikan keterampilan, dan UMKM berbasis syariah.

Misalnya, tanah wakaf yang selama ini dibiarkan tidak termanfaatkan dapat dijadikan lahan pertanian terpadu, kawasan ekonomi desa, atau pusat pelatihan kewirausahaan syariah. Hal ini akan mendorong penciptaan nilai tambah di sektor riil, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi ketimpangan wilayah. Dalam konteks urban, wakaf juga dapat digunakan untuk membangun rumah susun murah berbasis syariah, pasar rakyat, atau inkubator bisnis halal yang menampung pelaku usaha muda. Proyek-proyek seperti ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga dapat merangsang perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat secara bertahap.

Lebih jauh, wakaf produktif juga berperan dalam menstimulasi investasi jangka panjang, karena aset wakaf bersifat *perpetual* (berkelanjutan), tidak dijualbelikan, dan tidak habis pakai, sehingga menarik bagi pengelola keuangan syariah yang mencari instrumen stabil dan bernilai

sosial tinggi. Potensi ini juga sejalan dengan peran negara dalam mendorong *blended finance*, yakni kolaborasi antara dana sosial Islam (seperti wakaf dan zakat) dengan investasi pembangunan. Oleh karena itu, jika dikelola secara akuntabel dan transparan oleh nazhir profesional, wakaf dapat menjadi salah satu penyangga ekonomi kerakyatan yang tangguh, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi seperti deflasi, stagnasi, dan pengangguran massal.

Dalam konteks deflasi yang sering dipicu oleh lemahnya aktivitas sektor riil, pembiayaan syariah untuk UMKM menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses pembiayaan tanpa bunga (*riba*) kepada UMKM, memungkinkan mereka tetap memproduksi dan memperluas usaha, yang secara langsung meningkatkan *output* ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memacu permintaan masyarakat. Sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam pembiayaan syariah membuat pelaku usaha tidak tercekik utang saat penjualan turun, menjaga kelangsungan usaha. Terakhir, larangan penimbunan (*ihtikar*) menjaga pasokan barang tetap stabil. Islam melarang penimbunan barang untuk keuntungan pribadi, sehingga otoritas pasar dalam sistem ekonomi Islam memastikan semua orang bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar, membantu menjaga kestabilan ekonomi.

b) **Jaring Pengaman Sosial dan Konsumsi Beretika sebagai Benteng Resesi**

Kenaikan pengangguran, penurunan konsumsi, dan produksi hingga ekonomi lesu dalam waktu lama adalah penanda Resesi sedang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, jaring pengaman sosial melalui zakat dan sedekah menjadi sangat vital. Lembaga seperti LazisNU, Rumah Zakat, dan Baznas, dengan membagikan sembako, bantuan tunai, hingga modal usaha menjadi benteng pertahanan agar masyarakat tetap memiliki perlindungan saat ekonomi terpuruk. Lembaga di atas menjadi jaringan untuk memastikan konsumsi tetap ada dan roda ekonomi terus berputar. Selain itu, konsumsi beretika dan produksi berkelanjutan yang didasari gaya hidup syariah juga berperan penting. Islam mengajarkan untuk tidak boros (*tabdzir*) dan tidak berlebihan (*israf*), mendorong gaya hidup hemat dan sadar lingkungan yang dapat menjadikan ekonomi islam sebagai jalan penyelamat resesi. Gerakan *halal lifestyle* dan ekonomi hijau Islam, misalnya, mendorong pilihan produk lokal, pengurangan sampah, dan menghindari gaya hidup konsumtif berlebihan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas. Jika konsumsi stabil dan tidak berlebihan, produksi juga dapat berjalan wajar, menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, sehingga membantu menahan dampak resesi.

Fokus utama artikel ini adalah peran ekonomi islam dengan semua nilainya dapat megawal dan memitigasi terjadinya inflasi. Faktor penyebab terjadinya kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus dapat diminimalisir dengan gaya hidup sederhana yang dalam ajaran islam. Sikap hidup boros dan konsumtif akan memicu inflasi, hal ini terjadi karena karena nilai mata uang menurun ketika peredaran uang meningkat di antara masyarakat. Selain itu, dalam ekonomi Islam bunga bank dilarang, karena ia sebagai *riba*. Dan ini secara tidak langsung dapat membantu mengendalikan inflasi karena sistem bunga konvensional dapat mempercepat peredaran uang dan kredit yang tidak produktif. Sebagai gantinya adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset, ekonomi syariah mendorong investasi pada sektor riil yang produktif, bukan spekulatif, sehingga peningkatan pasokan barang dan jasa dapat menekan kenaikan harga.

Kansep lainnya dalam ekonomi islam adalah larangan menimbun harta. *Ihtikar* ini juga dapat juga berfungsi untuk mencegah inflasi yang disebabkan oleh manipulasi pasokan. Dengan memastikan distribusi barang yang adil dan melarang praktik monopoli, ekonomi Islam berupaya menjaga stabilitas harga di pasar melalui kontrol pasar yang adil dan transparan. Penyaluran zakat dan wakaf, selain membantu mengatasi deflasi, juga dapat berperan dalam mengatasi inflasi jika dana tersebut disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif di tingkat akar rumput, meningkatkan kapasitas produksi masyarakat miskin dan UMKM, dan menjaga suplai barang-barang esensial.

Fenomena deflasi yang berkepanjangan di Indonesia dari Mei-September 2024 dan Januari-Februari 2025, yang ditandai dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) selama delapan bulan berturut-turut, mengindikasikan adanya pelemahan fundamental ekonomi domestik. Deflasi ini lebih disebabkan oleh melemahnya permintaan masyarakat akibat penurunan daya beli dan kontraksi di sektor-sektor strategis, daripada peningkatan pasokan. Kondisi ini meningkatkan risiko resesi, yang ditandai dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Upaya pemerintah melalui bantuan sosial dan stimulus fiskal belum menunjukkan dampak signifikan, menunjukkan irelevansi pendekatan konvensional dalam menyelesaikan masalah struktural ini.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dan berorientasi keadilan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf, serta larangan penimbunan (*ihtikar*) dan sistem bagi hasil dalam pembiayaan UMKM, dapat menjadi solusi alternatif yang dialogis dengan kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilien. Dengan implementasi instrumen ekonomi Islam yang efektif, Indonesia dapat mengatasi tantangan deflasi dan resesi, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena deflasi berkepanjangan di Indonesia pada periode 2024-2025, yang berpotensi memicu resesi, sebagian besar tidak hanya disebabkan oleh fluktuasi harga sesaat, melainkan oleh pelemahan daya beli masyarakat dan ketimpangan struktural ekonomi. Ini adalah temuan krusial yang mungkin tidak selalu menjadi fokus utama dalam analisis ekonomi konvensional yang cenderung lebih menekankan pada aspek moneter atau siklus bisnis. Data menunjukkan bahwa meskipun ada intervensi seperti diskon tarif listrik, indikator seperti deflasi beruntun, penurunan peredaran uang, dan kecenderungan masyarakat menahan belanja mengindikasikan masalah daya beli yang lebih dalam. Lebih lanjut, analisis ini secara khusus menyoroti bahwa pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi yang secara signifikan lebih kontekstual dan responsif terhadap akar masalah deflasi dan resesi ini. Sistem konvensional, dengan fokus pada suku bunga dan kurangnya penekanan pada distribusi kekayaan langsung, terbukti memiliki keterbatasan yang memerlukan alternatif holistik seperti zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah berbasis aset.

Dalam konteks ini, diperlukan rekomendasi kebijakan ekonomi syariah yang lebih spesifik dan terukur agar prinsip distribusi dan keadilan sosial Islam benar-benar berfungsi sebagai

penyangga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa kebijakan strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Integrasi zakat dengan sistem fiskal nasional melalui mekanisme *Zakat Tax Credit*, di mana zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi dapat menjadi pengurang kewajiban pajak. Kebijakan ini dapat memperluas basis penerimaan zakat, mempercepat redistribusi kekayaan, serta memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah.
2. Optimalisasi wakaf produktif nasional dengan membentuk *Sovereign Waqf Fund* di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dana ini dapat difokuskan pada pembiayaan sektor pangan, pertanian, dan UMKM halal yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi daerah.
3. Peningkatan akses pembiayaan berbasis bagi hasil melalui sinergi antara Bank Syariah Indonesia, BMT, dan koperasi syariah. Model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menggantikan sistem kredit berbunga tinggi, sehingga pelaku usaha mikro memiliki peluang tumbuh tanpa terjerat utang konsumtif.
4. Digitalisasi ekosistem ZISWAF nasional dengan menggunakan teknologi *blockchain* dan *open data* untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan penyaluran dana sosial Islam. Langkah ini penting agar kebijakan sosial berbasis syariah terhubung langsung dengan program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.
5. Kebijakan edukasi dan literasi ekonomi syariah nasional untuk memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya konsumsi beretika, pengelolaan keuangan islami, dan investasi sosial produktif. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, kampus, lembaga zakat, dan komunitas masyarakat.

Dengan penerapan kebijakan tersebut, pendekatan ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif moral, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka kebijakan makroekonomi yang konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi ancaman deflasi dan resesi. Prinsip *equitable wealth distribution*, *real sector empowerment*, dan *ethical consumption* dalam ekonomi Islam berpotensi membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, & Widyasanti, A. A. (2025). Deflasi tahunan 2024 dan potensi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. 2024–2025.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 & triwulan III 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita resmi statistik: Indeks harga konsumen Maret 2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data Sakernas 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kontribusi konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024, 1 Agustus). *Berita resmi statistik: Indeks harga konsumen Juli 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks harga konsumen Januari 2025 dan Februari 2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat pengangguran terbuka Indonesia Februari 2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 1 Maret). *Berita resmi statistik: Indeks harga konsumen Februari 2025*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/>
- Bank Dunia. (2023). *Laporan rasio konsumsi 2023*.
- Bank Indonesia. (2024). *Survei kegiatan dunia usaha triwulan I 2024*.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan posisi utang luar negeri Indonesia Januari 2025*.
- Budiyanti, E., & Deniza, N. M. (2024). Dampak deflasi terhadap perekonomian dan upaya mengatasinya.
- Database. (2024). *Laporan distribusi kekayaan Indonesia 2024*.
- Gumerlar, A. (2024). *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 220(226). International Monetary Fund. (2024, Januari). *World economic outlook update*.
- Kementerian Keuangan RI, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Data penerimaan pajak dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I 2025*.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Data total utang negara Februari 2025*.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Laporan realisasi APBN Februari 2025*.
- Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. St. Martin's Press.
- Kurnia, D. (2023). Ekonomi syariah sebagai solusi krisis ekonomi di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(29), 633–640.

McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. The MIT Press.

Memory, L. S., Gated, D. A. N., & Unit, R. (2025). Peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan metode Long Short-Term Memory dan Gated Recurrent Unit. *Jurnal Gauss: Jurnal Pendidikan Matematika*, 14(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.14.1.13-22>

Pratama, B. E., & Susanti, A. (2023). Mufakat mufakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 2(2), 91–107.

Prayogo, Q. B., Astuti, R. P., & Faradisi, A. (2024). Analisis kebijakan moneter BI dalam perspektif ekonomi makro untuk merespon deflasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 504–506.

Prima, A. N., & Harimurty, K. (2024). Analisis dampak resesi terhadap kinerja perusahaan digital: Peran adopsi teknologi baru sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 8(1), 1881–1898. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3617>

Salastia, K., & Nisa, F. (2024). Konsep deflasi dan inflasi dalam ekonomi Islam menurut Al Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 28, 262–268. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/1100>

Wahyudi, A., & Aysiyah, E. N. (2024). Strategi pengendalian deflasi di Indonesia: Pendekatan ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi, 9. *World Inequality*